

**POSISI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BARANG
MELALUI SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK:
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
TINDAKAN PENIPUAN DAN KECURANGAN DALAM
MENJUAL BARANG**

DISERTASI

Oleh

**SORTA D.R.E. CESILIA PURBA
2107190034**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**POSISI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BARANG
MELALUI SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK:
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
TINDAKAN PENIPUAN DAN KECURANGAN DALAM
MENJUAL BARANG**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**SORTA D.R.E. CESILIA PURBA
2107190034**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SORTA D.R.E. CESILIA PURBA

NIM : 2107190034

Program Studi : Hukum Program Doktor

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "POSISI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK: KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN PENIPUAN DAN KECURANGAN DALAM MENJUAL BARANG":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 31 Mei 2025



Sorta D.R.E. Cesilia Purba

NIM: 2107190034



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**POSISI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI
SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK: KAJIAN YURIDIS
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN PENIPUAN
DAN KECURANGAN DALAM MENJUAL BARANG**

Oleh:

Nama : SORTA D.R.E. CESILIA PURBA
NIM : 2107190034
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 31 Mei 2025

Menyetujui,

Promotor

Prof. Ir. Roy H.M. Sembel, MBA., P.hD.

NIP/NIDN: 0310076405

Co Promotor I

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 141104/ 0327096504

Co Promotor II

Dr. Aartje Tehupeiorry, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 982572/ 0314086404



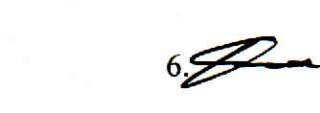
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 31 Mei 2025 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : SORTA D.R.E. CESILIA PURBA
NIM : 2107190034
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “POSISI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK: KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN PENIPUAN DAN KECURANGAN DALAM MENJUAL BARANG” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1. 
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2. 
3	Prof. Ir. Roy H.M. Sembel, MBA., Ph.D.	Penguji	3. 
4	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji	4. 
5	Prof. Dr. Aarce Tehupeior, S.H., M.H.	Penguji	5. 
6	Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Penguji	6. 
7	Dr. Fauzan, S.H., M.H.	Penguji	7. 



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**POSISI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI SISTEM
TRANSAKSI ELEKTRONIK: KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP TINDAKAN PENIPUAN DAN KECURANGAN DALAM MENJUAL
BARANG**

Nama : SORTA D.R.E. CESILIA PURBA
NIM : 2107190034
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 31 Mei 2025

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia



Direktur,
Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SORTA D.R.E. CESILIA PURBA
NIM : 2107190034
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : POSISI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BARANG
MELALUI SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK:
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP TINDAKAN PENIPUAN DAN
KECURANGAN DALAM MENJUAL BARANG

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 31 Mei 2025



Sorta D.R.E. Cesilia Purba
NIM: 2107190034



Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor: 0571/UKLPPS/HKP.03.01/2025

tentang:

**DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GENAP TA 2024/2025
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKIR/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GENAP TA 2024/2025 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2025

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan No. 0571/UKLPPS/HKP.03.01/2025
Tanggal : 27 Mei 2025



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GASAL TA 2024/2025**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Sabtu, 31 Mei 2025	10.30 - 12.30 WIB	Sorta D.R.E. Cesilia Purba NIM. 2107190034	POSISI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK : KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN PENIPUAN DAN KECURANGAN DALAM MENJUAL BARANG	1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Prof. Ir. Roy H.M. Sembel, MBA., Ph.D. 4. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. 5. Dr. Aartje Tehupecory, S.H., M.H. 6. Dr. Fauzan, S.H., M.H. 7. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Ketua Penguji Sekretaris Penguji / Promotor Penguji / Co Promotor 1 Penguji / Co Promotor 2 Penguji Penguji

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP./NIDK. : 191690/9990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dresscode:
 - Penguji : Baju Toga lengkap
 - Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdas

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat dan syukur Peneliti persembahkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih, kebaikan dan anugerah-Nya sehingga Peneliti dimampukan untuk menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul “Posisi Konsumen Dalam Pembelian Barang Melalui Sistem Transaksi Elektronik : Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Penipuan Dan Kecurangan Dalam Menjual Barang.”

Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Disertasi ini juga disusun dengan memanfaatkan berbagai literatur, baik elektronik maupun cetak dan mendapat pengarahannya serta bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para promotor, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan Penulis kekuatan dan berkat melimpah dalam berbagai perjuangan dan perjalanan Penulis, dan selanjutnya kepada Yang Terhormat dan Terpelajar Prof. Ir. Roy Sembel, MBA., Ph.D, selaku Promotor, Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ko-Promotor I.; serta Dr. Artje Tehupior, S.H., M.H, selaku Ko-Promotor II yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya disertasi ini. Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Bapak Edward Sirait, S.E., M.M, Selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
3. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, Selaku Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI).

4. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S, Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Prof. Ir. Roy H.M. Sembel, MBA., P.hD. selaku Promotor pada Ujian Usulan Penelitian, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Disertasi ini.
6. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., dan Dr. Aarce Tehupeior, S.H., M.H., selaku ko promotor 1 dan ko promotor 2 pada Ujian Hasil Penelitian, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Disertasi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak penulis sebutkan satu per satu.
8. Rovelinov, Rovelina dan F. Nento, serta seluruh keluarga yang memberikan dukungan dari awal hingga akhir.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan disertasi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

Penulis sangat menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi di bidang Hukum.

Jakarta, 31 Mei 2025

SORTA D.R.E. CESILIA PURBA
2107190034

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Lembar Pengesahan	v
SK Tim Penguji	
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Singkatan	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Dalil-dalil	xii
Abstrak	xiii
<i>Abstract</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
1. Secara Teoritis.....	16
2. Secara Praktis	16
E. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Perlindungan Hukum.....	18
2. Teori Kepastian Hukum.....	26
3. Teori Keadilan.....	32
F. Kerangka Konsep	38
1. Konsumen.....	38
2. Barang.....	42
3. Transaksi Elektronik.....	43
4. Pelaku Usaha.....	45
G. Metode Penelitian.....	46
1. Spesifikasi Penelitian.....	46
2. Pendekatan Penelitian.....	47
3. Jenis dan Sumber Data.....	49
4. Teknik Pengumpulan Data.....	51
5. Teknik Analisa Data.....	52
6. Lokasi Penelitian.....	52
H. Orisinalitas Penelitian.....	52
I. Sistematika Penelitian.....	59
BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG MELALUI SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG	61

	DIPEROLEH DARI PELAKU USAHA DALAM MENJUAL BARANG YANG MERUGIKAN KONSUMEN	
	A. Bentuk pelanggaran Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik.....	61
	B. Kasus kasus Pelanggaran Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Sistem Transaksi Elektronik ..	67
	C. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi elektronik	80
	D. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Penipuan dan Kecurangan Dalam Menjual Barang.....	211
	E. Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen di Philipina, Malaysia dan Singapura serta Australia.....	243
	F. Rangkuman dan Analisis Teori.....	272
BAB III	KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERADA PADA POSISI YANG LEMAH	279
	A. Konsumen dalam Transaksi Elektronik Pada Posisi Yang Lemah.....	279
	B. Faktor factor yang membuat konsumen dalam posisi lemah.....	310
	C. Peran Undang Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam perlindungan Konsumen.....	323
	D. Upaya Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik	331
	E. Analisis Yuridis terhadap Kelemahan Posisi Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Teori dan Hukum Positif.....	384
BAB IV	UPAYA HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN ATAS KERUGIAN DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK	393
	A. Konsumen dalam Pembelian Barang Melalui Sistem Transaksi Elektronik	395
	B. Tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap konsumen yang membeli barang Melalui Sistem Transaksi Elektronik ..	435
	C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha.....	475
	D. Analisis Teori Dalam Upaya Hukum Melalui Penjelasan Sengketa Konsumen.....	509
BAB V	PENUTUP	526
	A. Kesimpulan	526

B. Saran.....	531
DAFTAR PUSTAKA	533



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
BPKN	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
COD	<i>Cash on Delivery</i> (Bayar di Tempat)
E-commerce	<i>Electronic Commerce</i> (Perdagangan Elektronik)
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
OLX	<i>Online Exchange</i>
PP	Peraturan Pemerintah
UU	Undang-Undang
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)
YLKI	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hlm
Tabel 1.1	Kasus berita media social CNBC Indonesia	6
Tabel 1.2	Perbandingan Penelitian Terdahulu	57
Tabel 2.1	Definisi perlindungan hukum menurut beberapa ahli	80
Tabel 2.2	Beberapa Perubahan UU ITE	94
Tabel 2.3	Wawancara dengan Beberapa Konsumen	143
Tabel 2.4	Ketentuan Penerapan sanksi administrasi	166
Tabel 2.5	Tujuan pemberian sanksi secara Hukum Perdata	176
Tabel 2.6	Tujuan pemberian sanksi Pidana	186
Tabel 2.7	Jenis jenis Sengketa Bisnis	191
Tabel 2.8	Penerapan <i>Strict Liability</i> dalam Perlindungan Konsumen atas Produk Cacat	215
Tabel 2.9	Mekanisme Gugatan Konsumen	226
Tabel 2.10	Perbandingan singkat antara gugatan ke Pengadilan Negeri dengan Pengaduan BPSK	227
Tabel 2.11	Sudut Pandang Konsumen dalam membeli produk	229
Tabel 2.12	Standar Kualitas	266
Tabel 2.13	Perbandingan Australia dengan Indonesia	271
Tabel 3.1	Term of Service (ToS) secara positif dan negative	305
Tabel 3.2	Kompleksitas teknologi dalam sistem transaksi elektronik yang harus diketahui konsumen	318
Tabel 3.3	Peran Pemerintah dan lembaga terkait	335
Tabel 4.1	Pertumbuhan <i>E-Commerce</i>	399
Tabel 4.2	Perbedaan Marketplace dan Online Store	423
Tabel 4.3	Hak dan Kewajiban Para Pihak	475
Tabel 4.4	Konsep pengaturan penyelesaian sengketa digital	503
Tabel 4.5	Konsep pengaturan Pertanggungjawaban platform digital dan memastikan keamanan transaksi elektronik	505

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Hlm
Gambar 2.1	<i>Flowchart</i> Mekanisme Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik	218
Gambar 2.2	<i>flowchart</i> produksi barang	232
Gambar 4.1	Indonesia masuk kategori 10 negara yang sering berbelanja online tertinggi	398
Gambar 4.2	Alur pembelian barang melalui sistem transaksi elektronik	422



DALIL DALIL

1. Dalam transaksi elektronik, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, karena keterbatasan informasi dan kontrol terhadap barang. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.
2. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik merupakan amanat hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen, serta Pasal 9, Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan atau merugikan konsumen.
3. Pelaku usaha yang melakukan kecurangan atau penipuan dalam produksi barang wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang dan jasa yang tidak sesuai..
4. Efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen sangat bergantung pada implementasi norma hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen tentang mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dan Pasal 38 UU ITE tentang penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa.
5. Dalam menghadapi dinamika transaksi elektronik dan modus penipuan baru, diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi berbasis teknologi, sebagaimana disarankan dalam Pasal 5 dan Pasal 11 UU ITE, yang mengatur tentang pentingnya keamanan transaksi elektronik dan keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum..

ABSTRAK

Judul Disertasi : Posisi Konsumen Dalam Pembelian Barang Melalui Sistem Transaksi Elektronik : Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Penipuan Dan Kecurangan Dalam Menjual Barang

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik, Omnibus Law

Perkembangan transaksi elektronik membawa kemudahan bagi konsumen, namun juga meningkatkan risiko penipuan dan kecurangan dalam produksi barang. Konsumen kerap berada dalam posisi lemah ketika pelaku usaha melakukan tindakan merugikan. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penipuan dan kecurangan dalam transaksi elektronik, serta efektivitas regulasi yang berlaku.

Rumusan masalah meliputi: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik? (2) Mengapa konsumen berada pada posisi lemah? (3) Bagaimana upaya hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian?

Penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon untuk menganalisis perlindungan preventif dan represif bagi konsumen, Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch untuk mengevaluasi regulasi transaksi elektronik, serta Teori Keadilan oleh John Rawls guna memahami perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pihak rentan.

Jenis Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Data diperoleh dari peraturan hukum (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE), putusan pengadilan, serta literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan aturan hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Regulasi seperti UUPK, UU ITE, dan Permendag belum efektif melindungi konsumen dalam transaksi elektronik karena pengawasan lemah, posisi tawar konsumen rendah, dan sulitnya penyelesaian sengketa. 2) Konsumen dalam e-commerce sering dirugikan, seperti menerima barang cacat, keterlambatan pengiriman, dan penyalahgunaan data pribadi, sementara mekanisme hukum yang ada belum berjalan optimal. 3) Mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia masih kurang responsif dan terintegrasi dibandingkan Filipina dan Malaysia, memperlemah posisi konsumen dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan *Omnibus Law* Perlindungan Konsumen, yaitu penggabungan berbagai regulasi terkait ke dalam satu aturan hukum terpadu, guna mengatasi tumpang tindih aturan, memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa, serta memastikan kepastian hukum bagi konsumen.

ABSTRACT

Dissertation Title : Consumers' Position In Purchasing Goods Through Electronic Transaction Systems: A Legal Study Of Consumers' Protection Against Fraud And Deceit In Selling Goods.

Keywords : Consumer Protection, Electronic Transactions, Omnibus Law

The development of electronic transactions brings convenience to consumers, but also increases the risk of fraud and cheating in the production of goods. Consumers are often in a weak position when business actors take detrimental actions. This study examines legal protection for consumers against fraud and cheating in electronic transactions, as well as the effectiveness of applicable regulations.

The formulation of the problem includes: (1) What form of legal protection is there for consumers in electronic transactions? (2) Why are consumers in a weak position? (3) What are the legal remedies for consumers who suffer losses?

This study uses the Legal Protection Theory by Philipus M. Hadjon to analyze preventive and repressive protection for consumers, the Legal Certainty Theory by Gustav Radbruch to evaluate electronic transaction regulations, and the Justice Theory by John Rawls to understand legal protection for consumers as vulnerable parties

Types of Research method used is a type of normative legal research, which is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science from a normative perspective, with a statutory, case, and comparative approach. Data were obtained from legal regulations (Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions), court decisions, and related literature. Data analysis was carried out qualitatively-descriptively by comparing legal regulations and practices in the field.

Regulations such as the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Minister of Trade Regulation have not been effective in protecting consumers in electronic transactions due to weak supervision, low consumer bargaining position, and difficulty in resolving disputes. 2) Consumers in e-commerce are often disadvantaged, such as receiving defective goods, late delivery, and misuse of personal data, while existing legal mechanisms have not been running optimally. 3) The dispute resolution mechanism in Indonesia is still less responsive and integrated than the Philippines and Malaysia, weakening the position of consumers in electronic transactions. Therefore, this study recommends the formation of an Omnibus Law on Consumer Protection, namely the merger of various related regulations into one integrated legal rule, in order to overcome overlapping regulations, strengthen dispute resolution mechanisms, and ensure legal certainty for consumers.